

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian yang dilakukan secara rinci tentang berbagai fakta, definisi, variable serta teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman atau acuan untuk menemukan subjek penelitian untuk mencapai kebenaran dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian serta menjadi bahan perbandingan yang dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang sebelumnya sudah dibaca oleh peneliti. Pada penelitian terdahulu yang sudah dibaca tidak menelusuri penelitian sama dengan lokus dan fokus yang tidak sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti namun dapat membantu peneliti dalam pemecahan masalah yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian penelitian terdahulu ini akan memperkaya bahan penelitian dalam kajian penulisan dengan menyajikan berbagai ulasan sebagai referensi didalam penelitian ini, untuk membantu masalah-masalah yang akan dibahas. Peneliti memilih tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan terkait aplikasi selesai dalam gengaman dan penelitian terkait dengan pembuatan kartu identitas anak. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu terkait dengan tema penelitian penulis:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Pendekatan	Metode	Teknik
1	Fahran Ramansyah Putra	Analisis Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	1. Manajemen 2. Manajemen SDM 3. Pelayanan publik	Kualitatif	Deskriptif	Kepustakaan, Studi lapangan, Dokumentasi
2	Anisa Cahya Ningrum, Rino Ardhian Nugroho	Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman” Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta	1. Inovasi 2. E-government	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara dan Dokumentasi
3	Sukma Dina	Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi di Kota Yogyakarta)	1. Hak atas identitas anak 2. Kartu identitas anak	Sosiologis	Normatif	Wawancara dan Studi pustaka

Sumber: Data sekunder oleh peneliti

Berdasarkan dari tabel 2.1 diatas terkait penelitian terdahulu, peneliti menyajikan hasil dari penelitain tersebut yang akan memberikan arahan kepada peneliti terkait penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini hasil dari penelitian terdahulu:

1. Penelitian terdahulu Farhan Ramansyah putra (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Ramansyah Putra dengan judul “Analisis Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”, berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan kualitas pelayanan terhadap pembuatan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung berjalan cukup baik dilihat dari kecepatan pelayanan melalui program *one day service* yang dapat mempermudah dalam proses pelayanan Kartu Identitas Anak di Kota Bandung. Namun disisi lain kendala yang dihadapi dalam sarana pembuatan Kartu Identitas Anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Farhan Ramansyah Putra dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah terkait pelayanan dalam pembuatan kartu identitas anak serta lokus penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti terdapat pada permasalahannya.

2. Penelitian Terdahulu Anisa Cahya Ningrum (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Cahya Ningrum, Rino Ardhian Nugroho dengan judul “Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Dukcapil Dalam Genggaman oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta”, menyatakan bahwa dengan adanya aplikasi Dukcapil dalam genggaman dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Kartu Identitas Anak karena didalam proses pendaftaran Kartu Identitas Anak dapat dilakukan sewaktu-waktu dan cepat. Dengan adanya aplikasi Dukcapil dalam genggaman hingga dapat

menyederhanakan pelayanan sehingga menjadi lebih efisien dalam menghemat waktu, tenaga serta biaya sehingga pelayanan lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Cahya Ningrum, Rino Ardhian Nugroho dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah terkait pemanfaatan aplikasi selesai dalam gengaman (salaman) dalam pelayanan publik terkait administrasi kependudukan. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti terdapat pada permasalahan serta tempat pengambilan data. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Annisa Cahya Ningrum, Rino Ardhian Nugroho dilakukan pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

3. Sukma Dina (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Dina dengan Judul “Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi di Kota Yogyakarta)”, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kartu identitas anak di kota Yogyakarta masih terdapat hambatan dimana masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia serta penggunaan kartu identitas anak yang masih dianggap tidak penting oleh masyarakat karena masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa dengan adanya akta kelahiran dan kartu keluarga sudah cukup sebagai identitas anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sukma Dina (2018) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah terkait implementasi kartu identitas anak sebagai upaya dalam memberikan hak kepada anak yang berumur dibawah 17 tahun. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti terdapat pada lokus penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Sukma Dina dengan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

2.1.2 Administrasi

Administrasi dikenal masyarakat sebagai suatu aktivitas aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan untuk membantu, melayani dan mengatur masyarakat seperti dalam kegiatan pembuatan surat menyurat, catat – mencatat, pendataan dan sebagainya yang ada di suatu perusahaan atau perkantoran. Administrasi memiliki arti luas yaitu sebagai seni dan proses. Administrasi dalam artian luas sebagai seni penerapan administrasi yang sifatnya situasional dan kondisional. Sedangkan administrasi sebagai proses menyelenggaraan dalam administrasi yang melibatkan sekelompok orang yang dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Siagian dalam buku Ilmu Administrasi (2017:8) mengemukakan pendapat mengenai administrasi, yang dimaksud dengan administrasi ialah “proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan”. Administrasi yang dikemukakan oleh Siagian hamper sama dengan administrasi yang dikemukakan oleh The Liang Gie dalam buku Ilmu Administrasi (2017:8) mengemukakan pendapat bahwa

administrasi ialah “segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”.

Kedua pendapat tersebut mengenai administrasi memiliki beberapa kesamaan, yaitu administrasi merupakan suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian administrasi diatas disimpulkan bahwa administrasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mariati Rahman (2017:8) mengemukakan ciri – ciri pokok administrasi dalam bukunya Ilmu Administrasi, yaitu:

1. Sekelompok orang yang berarti kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukakn oleh lebih dari satu orang.
2. Kerja sama, yang berarti kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih dalam bekerja sama.
3. Pembagian tugas, yang berarti kegiatan administrasi bukan sekedar hanya kerja sama melainkan kerja sama yang harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
4. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, yang berarti kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
5. Tujuan, ynag berararti sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Kelima ciri-ciri administrasi yang dikemukakan oleh Mariati Rahman bahwa administrasi merupakan suatu proses dalam penyelenggaraan kerja sama antara dua orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kebijakan dimana kebijakan merupakan suatu keputusan atau tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.1.3 Administrasi publik

Administrasi publik terdiri atas dua suku kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ad* yang berarti intensif dan *ministrare* yang artinya melayani dengan demikian administrasi dapat diartikan membantu dan melayani secara intensif. Sedangkan publik memiliki arti umum, negara, masyarakat atau orang banyak. Caidan (1982) dalam buku Teori Administrasi Publik (2020:3) mengemukakan pendapat tentang administrasi publik, pendapat Caidan mengenai administrasi publik, yaitu:

“Administrasi publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerja sama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, pengarahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain yang dijalankan oleh Lembaga eksekutif dan Lembaga-lembaga pemerintahan lainnya”.

Administrasi publik yang dikemukakan oleh Caidan diatas hampir sama dengan pengertian administrasi publik yang dikemukakan oleh Ibrahim dalam buku Teori Administrasi Publik (2020:3), pendapat Ibrahim tentang Administrasi Publik, yaitu “seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia”.

Pasolong dalam Revida et.al (2020:3) menyatakan bahwa administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Dari pernyataan tersebut dapat

disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih atau suatu lembaga secara rasional yang dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat tentang administrasi publik tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi publik yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan untuk mencapai tujuan publik yang telah ditetapkan agar berjalan secara efektif dan efisien dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1.4 Administrasi Kependudukan

Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu atau warga negara atau warga negara asing yang menempati suatu negara atau wilayah. Kependudukan suatu hal yang berhubungan dengan jumlah struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Administrasi kependudukan ialah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pedaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dari pengertian diatas administrasi kependudukan berarti

setiap penduduk harus didata melalui penertiban dokumen yang akan mempermudah pemerintahan dalam urusan melayani masyarakat yang berkaitan dengan kependudukan hal itu akan tercapai apabila dokumen yang berkaitan dengan penduduk di kelola dengan baik dan benar.

Setiap penduduk memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara, kewajiban setiap penduduk ialah untuk memenuhi segala peraturan pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan. Sedangkan hak dari setiap penduduk atau warga negara ialah mendapatkan perlindungan serta diperlakukan secara adil dalam segala urusan terkait kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum.

2.1.5 Kebijakan

Kebijakan atau yang sering kita dengar dengan istilah *policy* yang memiliki arti kebijakan atau kebijaksanaan. Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak arti. Secara umum kebijakan memberikan arti yang menunjukkan pada suatu keputusan atau suatu tindakan yang memberikan arah. Sedangkan secara spesifik kebijakan dapat diartikan sebagai suatu ide kebijakan yang berkaitan dengan cara atau alat serta tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan sesuai dengan saran yang diinginkan. Eko Handoyo dalam bukunya Kebijakan Publik (2012: 4-5) menyatakan beberapa definisi dari kebijakan yaitu:

1. Menurut Hogwood dan Goon, dalam buku tersebut Hogwood dan Goon menyatakan kebijakan ialah “kebijakan yaitu sebagai lebel untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum anau negara, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output dan sebagai hasil”.

2. Menurut Budiarjo, dalam buku tersebut budiarjo menyatakan kebijakan ialah “kebijaksanaan memiliki makna yang tidak jauh dari kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu”.
3. Menurut Anderson, dalam buku tersebut Anderson menyatakan kebijakan ialah “serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi”.
4. Menurut Post Et Al, dalam buku tersebut menyatakan bahwa kebijakan ialah “rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan penduduk negara”.

Berdasarkan beberapa pengertian dari kebijakan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

2.1.6 Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* merupakan suatu aturan yang dapat mengatur kehidupan bersama yang harus di taati seluruh warga negara dan akan mengikat warga negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Aturan atau peraturan yang kita dengar kemudian secara sederhana dapat kita pahami sebagai kebijakan publik. Istilah kebijakan publik itu sendiri tidak asing lagi tetapi sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kegiatan akademis maupun dalam ilmu politik.

Pendapat para ahli terkait kebijakan publik ada berbagai definisi, definisi kebijakan publik menurut Nugroho (2012:6) dalam buku Kebijakan Publik, yang mengemukakan pendapat tentang kebijakan publik, yaitu “kebijakan publik

merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan, negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja yang bekerja seperti tiran dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri atau kelompok saja”. Didalam kebijakan publik terdapat tata kelola negara yang dapat mengatur interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya. Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai komponen negara dapat dilihat dari pendapat Nugroho (2012:7) dalam buku Kebijakan Publik menyatakan bahwa:

“setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara dan mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikan lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik dan itulah merupakan tugas pemerintah atau negara yang sesungguhnya”.

Pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nugroho, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan negara karena dalam suatu negara terdapat pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola negara sehingga negara tersebut memiliki aturan untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Kemudian didalam mengimplementasikan kebijakan publik ada proses-proses untuk menentukan kebijakan yang akan dibuat, adapun proses-proses dalam kebijakan publik menurut James Anderson (2019:19) dalam buku Implementasi Kebijakan Publik, proses dalam kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*Problem Formulation*)
Apa masalahnya dan apa yang membuat hal tersebut menjadi suatu masalah dan bagaimana masalah tersebut sehingga dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*)

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan suatu masalah tersebut dan siapa yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan.

3. Penentuan kebijakan (*adoption*)
Menentukan alternative yang ditetapkan dengan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi, siapa pelaksana kebijakan, dan menentukan bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan.
4. Implementasi (*implementation*)
Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan dan apa dampak dari kebijakan tersebut?
5. Evaluasi (*evaluation*)
Proses melihat tingkat keberhasilan atau dampak dari suatu kebijakan, dan ditahap ini menentukan apakah akan melakukan perubahan atau pembatasan dari kebijakan publik.

Sholichin Abdul Wahab dalam buku Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan (2012:24-32), hakikat kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu, kebijakan pemerintah terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. *Policy demands* (tuntutan kebijakan)
Tuntutan atau desakan yang ditujukan kepada pejabat pemerintah yang dilakukan baik dari sektor swasta ataupun dikalangan dalam pemerintah sendiri. Tuntutan-tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu atau tuntutan yang berkaitan dengan usulan untuk mengambil tindakan tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat.
2. *Policy decisions* (keputusan kebijakan)
Keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksana kebijakan publik.
3. *Policy statement* (pernyataan kebijakan)
Pernyataan kebijakan ialah pernyataan resmi mengenai kebijakan publik tertentu. Termasuk didalamnya ketetapan-ketetapan MPR, keputusan presiden atau dekrit presiden, peraturan-peraturan administrasi serta apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tertentu.
4. *Policy output* (keluaran kebijakan)
Keluaran kebijakan merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling konkrit dalam artian bahwa pada tahap ini kebijakan publik dan dilihat dan dirasakan oleh masyarakat karena menyangkut hal yang dilakukan untuk merealisasikan apa yang telah ditetapkan dalam

keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan menyangkut apa yang sesungguhnya akan dikerjakan oleh pemerintah.

5. *Policy outcomes* (hasil akhir kebijakan)

Hasil akhir kebijakan merupakan akibat atau dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

2.1.7 Implementasi kebijakan

Implementasi merupakan suatu aktivitas terkait dengan menyelesaikan suatu pekerjaan yang menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Dunn (2014: 53) dalam buku Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemetintahan Daerah memberikan argument terkait dengan implementasi kebijakan, yaitu: *“Policy implemetation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentilly theoretical.* Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi”. Sementara itu menurut Abdul Wahab (2014:55) dalam buku Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemetintahan Daerah mengatakan bahwa implementasi kebijakan, yaitu “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan mengatur proses implementasi”.

Berdasarkan pengertian dari implementasi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi kenyataan.

2.1.7.1 Model-Model Implementasi kebijakan

Akhir dari suatu kebijakan yaitu bagaimana implementasi kebijakan tersebut. keberhasilan dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terhubung. Van Meter dan Van Horn (2014: 71) dalam buku Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemetintahan Daerah yang mempengaruhi kinerja Implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
6. Sikap para pelaksana

Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, George C. Edwards III (1980) dalam buku Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemetintahan Daerah (2014: 61-70) mengemukakan faktor-faktor dalam implmentasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication* (komunikasi)

Salah satu syarat agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik yaitu dengan mengetahui apa yang harus dilakukan komunikasi mempunyai peran dalam hal ini. Komunikasi dapat berperan sebagai acuan agar pelaksana dari suatu kebijakan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dengan kata lain komunikasi juga dapat diartikan sebagai perintah dari atasan terhadap pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

2. *Resourches* (faktor sumber daya)

Sumber daya dalam proses implementasi kebijakan meliputi staff dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup, berbagai fasilitas yang termausk didalhnya berupa peralatan, bangunan dan persediaan. Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan karena jika para pelaksana suatu kebijakan kurang mempunyai sumber untuk melakukan pekerjaannya secara efektif maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan secara efektif.

3. *Dispotition* (faktor sikap pelaksana)

Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan mempunyai peran penting karena jika mengharapkan dalam implementasi kebijakan

berjalan dengan efektif maka pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memiliki kapasitas terhadap apa yang seharusnya untuk dilakukan dan juga mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. *Bureaucratic structure* (faktor struktur birokrasi)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena ketidak efisiensi struktur birokrasi yang ada.

Implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang akan menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Abidin (2004:148) suatu kebijakan mampu diimplementasikan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Alasan atau tujuan dari kebijakan tersebut. adapun kriteria dari alasan atau tujuan tersebut sebagai berikut:
 - 1) Rasional, rasional yang berarti suatu kebijakan yang tujuannya masuk akal dan dapat diterima oleh akal yang dapat dilihat dari faktor pendukungnya.
 - 2) Diinginkan, diinginkan yang berarti tujuan kebijakan tersebut melibatkan orang banyak sehingga dapat diterima oleh masyarakat.
2. Asumsi yang berarti kebijakan ini perumusannya jelas adanya dan tidak mengada-ngada.
 - 1) Pemahaman, pemahaman yang berarti para pelaksan kebijakan mengetahui dan memahami bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut.
 - 2) Ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan yang berarti bagaimana kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah.

3. Informasi, informasi merupakan suatu alat komunikasi untuk menginformasikan kebijakan dengan demikian informasi yang disampaikan harus benar karena apabila informasi tersebut tidak benar maka kebijakan tersebut akan sulit berjalan secara efektif.

1) Sosialisasi, sosialisasi kebijakan merupakan hal yang berkaitan dengan interaksi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran dari kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

2) Kejelasan, kejelasan merupakan informasi yang diberikan oleh pelaksana kegiatan harus jelas dan tepat tersampaikan kepada sasaran kebijakan atau penerima dari kebijakan tersebut.

2.1.8 Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu identitas anak merupakan suatu identitas resmi kependudukan bagi anak yang berusia 0-17 tahun yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Kartu identitas anak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Tujuan dari kartu identitas anak ini ialah untuk pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak-anak. Kartu identitas anak ini tidak hanya diperuntukkan untuk anak warga negara Indonesia tetapi juga untuk anak warga negara asing. Didalam kartu identitas anak terdapat element-element tentang data diri dari anak tersebut. berikut ini elemen yang terdapat didalam kartu identitas anak:

Tabel 2.2

Syarat pembuatan kartu identitas anak

No	Anak yang berusia kurang dari 5 tahun atau usia 0-5 tahun	Anak yang berusia diatas 5 tahun atau usia 5-17 tahun
1	<i>Fotocopy</i> Akta kelahiran dan akta kelahiran asli	Fotocopy akta kelahiran dan akta kelahiran asli
2	Kartu keluarga orang tua	Kartu keluarga orang tua
3	Kartu tanda penduduk kedua orang tua	Kartu tanda penduduk kedua orang tua
4		Pas foto anak ukuran 2 x 3 sebanyak dua (2) lembar

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung

2.1.8.2. Jenis-jenis Kartu Identitas Anak

Kartu identitas anak memiliki dua (2) jenis yaitu: kartu identitas anak yang berusia 0-5 tahun kurang satu hari dan kartu identitas anak yang berusia 0-17 tahun kurang sehari. Masa berlaku kartu identitas anak sebagai berikut:

1. Masa berlakunya kartu identitas anak untuk anak yang berusia 0-5 tahun kurang sehari sampai anak tersebut usia 5 tahun. Kemudian untuk memperpanjang masa berlakunya kia tersebut maka orang tua harus membawa persyaratan yaitu foto anak berwarna 2 x 3 sebanyak dua (2) lembar karena untuk kartu identitas anak usia 5-17 tahun memiliki foto.
2. Masa berlakunya kartu identitas anak untuk anak yang berusia 5-17 tahun kurang sehari ialah sampai anak tersebut berusia 17 tahun karena jika anak tersebut sudah berusia 17 tahun maka kartu identitasnya akan diganti dengan kartu tanda penduduk (KTP).

2.1.9 Selesai Dalam Genggaman (SALAMAN)

Aplikasi selesai dalam genggaman (salaman) merupakan salah satu upaya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Aplikasi salaman merupakan suatu aplikasi untuk pengurusan dokumen-dokumen yang dapat dilakukan melalui teknologi dengan demikian akan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen terkait dengan kependudukan.

Proses pelayanan terkait pengajuan dokumen dengan menggunakan aplikasi salaman, sebagai berikut: hal pertama yang harus dilakukan untuk pengajuan dokumen melalui aplikasi salaman ialah mengunduh aplikasi tersebut melalui *smartphone* yang saat ini hanya tersedia melalui *Google Play Store*, setelah aplikasi salaman diunduh maka tahap selanjutnya ialah pemohon harus melakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setelah pendaftaran maka dapat memasuki halaman pertama dari aplikasi salaman tersebut. pada halaman pertama tersebut akan terdapat beberapa pelayanan untuk masyarakat pelayanan terkait akta kelahiran, akta kematian, KIA dan sebagainya.

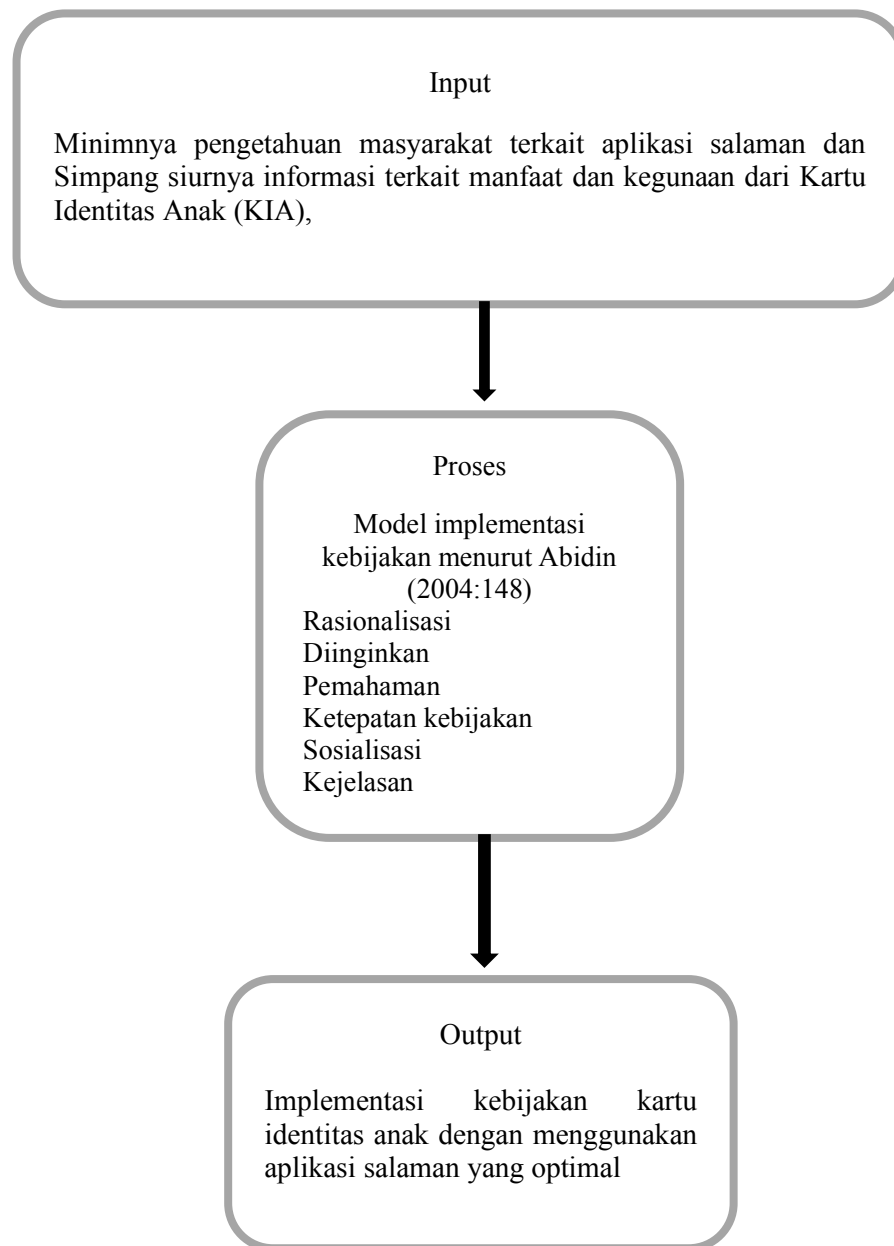
2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan pedoman garis besar dari suatu penelitian. Pedoman tersebut bertujuan untuk mengukur sejauhmana kesesuaian penelitian dengan kenyataan dilapangan yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan tersebut dikeluarkan secara sah untuk mengelola input yang menghasilkan output atau manfaat bagi masyarakat.

Terkait penelitian ini peneliti menggunakan teori yang menjadi acuan atau pedoman untuk kerangka berfikir dalam penelitian ini. Penelitian Implementasi Kebijakan Tentang Program Selesai Dalam Genggaman (salaman) Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menggunakan teori implementasi menurut Abidin (2014:148), dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 dimensi, yaitu:

1. Rasional, rasional yang berarti suatu kebijakan yang tujuannya masuk akal dan dapat diterima oleh akal yang dapat dilihat dari faktor pendukungnya.
2. Diinginkan, diinginkan yang berarti tujuan kebijakan tersebut melibatkan orang banyak sehingga dapat diterima oleh masyarakat.
3. Pemahaman, pemahaman yang berarti para pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan yang berarti bagaimana kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah.
5. Sosialisasi, sosialisasi kebijakan merupakan hal yang berkaitan dengan interaksi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran dari kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.
6. Kejelasan, kejelasan merupakan informasi yang diberikan oleh pelaksana kegiatan harus jelas dan tepat tersampaikan kepada sasaran kebijakan atau penerima dari kebijakan tersebut.

Dimensi-dimensi diatas mempunyai peran penting dalam tercapainya keberhasilan terkait implementasi kebijakan sehingga model implementasi kebijakan menurut Abidin tersebut tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tentang Program Selesai Dalam Genggaman (salaman) Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Berikut ini peneliti mencoba untuk menggambarkan kerangka pemikiran seperti berikut ini:



Gambar 2.2

Kerangka berpikir

Input merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan implementasi kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintahan. Dalam penelitian ini permasalahan yang muncul dalam implementasi program salaman dalam pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandung terlihat dari kurang optimalnya kepemilikan kartu identitas anak untuk anak hal ini disebabkan oleh

minimnya pengetahuan masyarakat terkait aplikasi salaman kemudian masalah lainnya terkait dengan kartu identitas anak itu sendiri yaitu terkait simpang siaurnya informasi yang berkaitan manfaat dari kartu identitas anak.

Proses merupakan tahap dimana teori yang digunakan didalam penelitian. Didalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik berdasarkan faktor implementasi yang saling berhubungan, yaitu dengan dilihat dari tahap awal pembuatan kebijakan tersebut dimana kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat diterima oleh akal sehat serta kebijakan tersebut dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Pemahaman pegawai serta ketepatan kebijakan menjadi tahap untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan dibuatnya kebijakan. Sosialisasi dan kejelasan mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan hal ini berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan.

Output merupakan hasil akhir yang akan dicapai dengan implementasi kebijakan tentang kepemilikan dari kartu identitas anak di Kota Bandung dengan menggunakan aplikasi salaman yang optimal.

2.3 Proposisi

Berdasarkan rumusan masalah di dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada prosisi mengenai Implementasi Program Selesai Dalam Genggam (SALAMAN) dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai berikut:

- 2.3.1. Pelaksanaan implementasi kebijakan tentang program Selesai Dalam Genggaman (salaman) pada pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang belum berjalan optimal didasarkan pada konsep Rasionalisasi, Diinginkan, Pemahaman, Ketepatan Kebijakan, Sosialisasi dan kejelasan.
- 2.3.2. Hambatan yang dialami dalam implementasi kebijakan tentang program Selesai Dalam Genggaman (salaman) dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- 2.3.3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan implementasi kebijakan tentang program Selesai Dalam Genggaman (salaman) dalam pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.